

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari skripsi dengan judul *GEJOLAK PATANI DALAM PEMERINTAHAN THAILAND (Kajian Historis Proses Integrasi Rakyat Patani Ke Dalam Wilayah Pemerintahan Thailand 1902-1932)* yang mengacu pada pembahasan, sesuai dengan masalah yang dikaji.

5.1 Kesimpulan

Pertama, kebijakan integrasi Pemerintah Thailand terhadap Patani, hal ini sebagai upaya untuk *mono-ethnic character of the state* etnik tunggal yang menjadi ciri khas dari Negara Thailand. Selain itu berbagai pola integrasi yang dilakukan bangsa Eropa kemudian disadari Raja Chulalongkorn sebagai salah satu gagasan yang tepat dalam mempertahankan daerah jajahannya dan urusan dalam negerinya. Fenomena ini disadari ketika Raja Chulalongkorn berkunjung ke wilayah Jawa dan Sumatera yang diduduki oleh Belanda, juga Singapura dan Malaysia yang diduduki oleh Inggris dan sekaligus mengilhami Raja Chulalongkorn menciptakan konsep integrasi dengan istilah *Thesaphiban* dan *Monthon* (satuan administrasi daerah).

Dimulai pada tahun 1902, Pemerintah Thailand telah menetapkan integrasi wilayah Patani ke dalam wilayah Thailand. Pada tahun-tahun awal inilah kegiatan oposisi yang dipimpin oleh keluarga kerajaan digulingkan oleh para pemimpin Islam karismatik, yang kepemimpinannya semakin jatuh. Sebagai loyalitas atas kehilangan posisi agama Islam, mereka sebagai Muslim diperkuat dalam meningkatkan respons *non 'Thaicization'* (Thaisisasi) atau anti-Siam. Reaksi kolektif pun muncul dari Muslim-Melayu Patani ini sehingga memicu penindasan-penindasan yang lebih keras dari pihak pemerintah Thai. Hal yang paling signifikan pada periode ini adalah

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

setelah secara final Patani dimasukkan ke dalam Kerajaan Thai, dengan adanya upaya mempertahankan identitas Melayu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian muncul respons dari kalangan mantan para Raja daerah Patani Raya sekaligus memimpin perlawanan terhadap Pemerintah Thailand.

Kedua, Siam menginginkan kekuasaan mutlak sebagai negara kerajaan yang independen dan mendapatkan pengakuan dari bangsa Eropa. Akibatnya Siam menekankan isu nasionalisme untuk menegaskan kembali kontrol Negara dan supremasi terhadap kelompok minoritas. Kebijakan integrasi Siam (Thai) atau konsep modernisasi dan westernisasi Siam dengan memasukan ide pemerintahan Barat dan administrasi serta perubahan ekonomi ke pasar dan ekonomi tunai. Serangkaian kebijakan ini disebut integrasi politik administrasi atau *Thesaphiban*, terjadi pada dua tingkatan secara suprastruktural maupun struktural. Pada tingkatan suprastruktural mendorong pengembangan ideologi nasionalisme dan konsep suatu negara, sedangkan dalam struktural integrasi mencakup dalam bidang politik dan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan negara dan program-program Negara. Pada tingkat struktur terjadi kesenjangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, ditandai dengan migrasi paksa, permintaan otonomi daerah, dan kesenjangan dalam distribusi. Sumber daya yang didominasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam segala aspek baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial yang menjadi pilar utama sebuah bangsa sehingga membentuk masyarakat majemuk.

Cara integrasi Pemerintah Siam selain mereformasi administrasi negara adalah dengan cara tradisional melalui pengintegrasian pimpinan agama, terutama agama Budha ke dalam hierarki keagamaan nasional. Cara ini sekaligus membuktikan bahwa kekuasaan sekuler yang diwakili Raja berusaha memanipulasi dan mengintegrasikan ke dalam satu hierarki agama yaitu agama Budha. Artinya ada

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kesan bahwa landasan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Siam berasal dari asas dan konsep Budha. Upaya ini sebetulnya demi memecahkan persoalan dalam hubungan antar golongan etnis. Tetapi, jika suatu kebijakan Negara berlandaskan pada konsep suatu agama, maka ujung persoalan ini menjadi sebuah konflik agama yang tidak bisa dielakkan lagi. Disisi lain konsep integrasi Thai merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Pemerintah Thai terhadap Patani dan mewujudkan *mono-ethnic character of the state* (etnik tunggal yang menjadi ciri khas dari negara Thailand) di selatan.

Ketiga, setelah diterapkannya kebijakan integrasi reformasi administrasi Siam terhadap Patani, struktur politik Kerajaan Melayu Patani mengalami perubahan. Jabatan Raja dicopot, Raja kehilangan sumber penghasilannya dari pajak, kemudian memancing kemarahan dari pihak Raja. Kemarahan tersebut diilustrasikan raja-raja Patani dengan berbagai pemberontakan. Gerakan pemberontakan melawan Thailand tersebut dikoordinasi oleh Raja Abdul Kadir Kamaruddin (Raja terakhir Patani). Para Raja menolak melaksanakan perintah Pemerintah Thailand untuk mengikuti kebijakan reformasi administratif, dengan memboikot semua pertemuan yang diadakan pejabat-pejabat Siam yang pada akhirnya menyebabkan mereka dicopot dari jabatan mereka sebagai Raja.

Pemberontakan berlanjut hingga berakhir dengan ditangkapnya Abdul Kadir Kamaruddin dan dipenjarakan di Phitsanulok hingga tahun 1916. Setelah dibebaskan dari penjara, Sultan dipindahkan untuk tinggal di Kelantan. Perjuangan yang dipelopori Raja Abdul Kadir Kamaruddin tersebut menginspirasi rakyat Melayu-Muslim Patani yang melihat aturan ini sebagai serangan terhadap budaya Patani oleh program *Thaisasi*. Dalam pemberontakan terjadi bentrokan antara warga Desa Namsai dengan aparat keamanan Pemerintah Thailand, dengan jumlah korban terbanyak dari kalangan Muslim Patani. Melayu-Muslim Patani bertekad untuk

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

meneruskan perjuangan melawan Pemerintah Thailand, melalui pemberontakan Namsai Baan pada tahun 1922. Pada pemberontakan ini, penduduk Desa di Mayo Namsai Patani, menolak untuk membayar pajak dan sewa tanah terhadap Pemerintah Siam sebagai respons terhadap penolakan reformasi pendidikan yang diperkenalkan tahun 1921. Dalam banyak hal pemberontakan Namsai merupakan suatu peristiwa yang unik dalam sejarah gerakan kemerdekaan Patani, karena menentukan arah perjuangan di kemudian hari.

Keempat, program wajib mengikuti pendidikan Thai, yang dimulai di masa pemerintahan Raja sebelumnya sudah mulai menampakkan pengaruhnya terhadap masyarakat tradisional Melayu. Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid, didorong untuk mengubah kurikulumnya sehingga mencakup pelajaran bahasa dan indoktrinasi kewargaan Thai yang telah dirancang oleh Bangkok. Yang paling meresahkan penduduk setempat adalah semakin besarnya pengawasan Thai atas segala dimensi kehidupan sehari-hari. Sebuah kebudayaan yang khas dengan sejarah yang berkesinambungan, untuk pertama kali kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahasa agama dan nilai-nilai budaya mereka lainnya telah ditempatkan di bawah kekuasaan yang semakin besar dari sebuah Negara yang didominasi oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir.

Pada 13 Maret 1960, para pemimpin Patani yang terdiri dari beberapa kalangan baik itu dari tokoh politik, tokoh ulama dan bangsawan mengambil langkah untuk menumbuhkan sebuah organisasi perjuangan yang dinamakan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Sebagai penggagas adalah Ustaz Karim Hasan, Muhammad Amin, Tuan Guru Haji Yusuf Capakiya dan Tengku Abdul Jalal. BRN adalah salah satu organisasi politik yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan cara Revolusi bersenjata. BRN mengalami perpecahan di kalangan para pemimpin yang berlainan

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

ideologi. Pada tahun 1968, *Patani United Liberation Organization* (PULO) dibentuk, PULO dianggap oleh masyarakat Patani merupakan organisasi yang mengordinasikan banyak kelompok gerilya untuk memerangi pemerintah Thai. PULO dianggap lebih praktis, juga sebagai senjata untuk lebih meluaskan cakupannya pada semua pihak dalam masyarakat Patani. Bagi mereka yang tidak setuju dengan pemahaman ideology Ustaz Karim, kemudian mereka membangun sebuah organisasi baru yang bernama Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP). BNPP mendapat dukungan kuat dari pada kalangan elit, guru agama dan kalangan intelektual, serta mendapatkan dukungan moral secara meluas dari masyarakat Patani pada umumnya. Perjuangan BNPP berdasarkan pendekatan kearah kebangsaan Melayu dan Islam, maka dengan itulah BNPP mendapatkan dukungan yang cukup banyak.

5.2 Saran

Skripsi berjudul “*GEJOLAK PATANI DALAM PEMERINTAHAN THAILAND (Kajian Historis Proses Integrasi Rakyat Patani Ke Dalam Wilayah Pemerintahan Thailand 1902-1932)*” ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bagi lembaga pendidikan kajian dalam skripsi ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai materi sejarah Asia Tenggara. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah kelas XI, yakni Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, Pan Islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia-Afrika pada masa itu dan masa kini. Kemudian sebagaimana pada saat ini pendidikan karakter sedang ditekankan kepada siswa, maka penelitian ini dapat diambil manfaatnya terutama dari karakter positif para tokoh dan masyarakat yang terlibat di dalamnya seperti sifat pekerja keras, cinta tanah air, tidak pantang menyerah, dan sebagainya. Kemudian

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

hal-hal negatif yang harus dihindari seperti ambisi yang berlebihan dengan mengorbankan banyak nyawa, cinta tanah air yang cenderung mengarah kepada perasaan Chauvinisme, melakukan ancaman, tindak kekerasan, bahkan membunuh orang-orang atau kaum yang tidak berdaya, dan sebagainya.

2. Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Untuk lembaga perguruan tinggi, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, skripsi ini dapat dijadikan sumber tambahan penelitian dan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah Asia Tenggara pada umumnya dan sejarah mengenai Gejolak Patani Dalam Pemerintahan Thailand (Kajian Historis Proses Integrasi Rakyat Patani Ke Dalam Wilayah Pemerintahan Thailand 1902-1932) secara khusus.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, skripsi berjudul perlawanan rakyat Patani terhadap pemerintahan Thailand ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih melengkapi materi terutama mengenai Thailand.

Adam Jamaluddin, 2014

Gejolak patani dalam pemerintahan Thailand

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu